

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim, salah satu negara dengan kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dari timur Sabang sampai barat Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai ras suku bangsa yang berbeda dari, adat istiadat, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid selatan/Austronesia dan Malanesia. Dengan latar belakang ratusan suku bangsa yang berbeda. Keberagaman membuat Indonesia semakin kaya akan budaya dan bahasa-bahasa yang dimiliki bangsa itu sendiri. Tidak hanya kaya akan suku dan budaya. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam seperti tambang emas, batu bara, minyak bumi, dan berbagai sumber daya alam lainnya, di bidang perkebunan ada perkebunan kelapa sawit, karet sebagai unggulan, dan di bidang perikanan Indonesia memiliki laut yang luas dengan garis pantai 99.993 kilo meter.<sup>1</sup>

Sayangnya walaupun Indonesia diberkahi sumber daya alam yang berlimpah, tetapi pemanfaatannya belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, apalagi Indonesia belum mampu mengelola semua sumber daya alamnya, sehingga tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk harus bekerja sama dengan negara asing dalam pengelolaan sumber daya alamnya, yang mana kala hasil kerja sama dengan negara asing tidak selalu menguntungkan Indonesia,

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> di unduh 19 maret 2018

sumber daya alamnya yang berlimpah di alam Indonesia semua itu tidak bisa menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada bulan september 2017, 26,58 juta orang indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sumber: Badan Pusat Statistik.

2

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 :

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”<sup>3</sup>

Masalah kesejahteraan sosial yang telah melanda bangsa Indonesia saat ini, salah satu di antaranya adalah masalah kemiskinan. Ini merupakan masalah sosial yang harus dihadapi secara serius dan terencana, karena jika tidak di perhatikan dan tidak ditangani secara terencana, dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan masalah kemiskinan itu, masyarakat dapat menggunakan segala cara untuk mempertahankan hidupnya tanpa memperhatikan dampak negatif yang dapat timbul atau yang di timbulkan baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain di sekitarnya. Dampaknya tidak hanya terhadap kredibilitas pemerintah tetapi juga kesinambungan proses pemulihan ekonomi.

Pengentasan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang, tidak ada satu negara pun yang

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> di unduh 10 maret 2018

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial

menginginkan rakyat mengalami kemiskinan karna itu sejalan dengan komitmen nasional, kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanganannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial:

*“Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;*
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial”.*

Penuntasan masalah kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah dan semua pihak, langkah harus dikerjakan dan di lakukan sungguh-sungguh, berkelanjutan, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan berdasarkan keadilan sosial yaitu kesejahteraan. Oleh karena itu, yang menjadi sumber penting dalam memecahkan masalah kemiskinan adalah kepedulian bersama. Antara kesejahteraan sosial dan peran negara, sangat erat kaitannya dalam suatu negara bagaimana manusia harus mencapai yang namanya kesejahteraan demi keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesejahteraan merupakan kunci utama untuk dapat membantu orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan.

Tidak hanya peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah juga sangat vital dalam pembangunan kesejahteraan yang merata di kehidupan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, kekayaan alam pun belum mampu mensejahterahkan masyarakat yang sekitarnya. Contoh kita lihat pada Kabupaten Bengkalis, harus kita ketahui bahwa Kabupaten Bengkalis terkenal kaya akan sumber kekayaan alamnya, seperti migas, sektor perkebunan, perikanan, kelautan, yang berlimpah ruah namun hal tersebut tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya terutama suku minoritas Suku Asli atau Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Bengkalis dijuluki sebagai Kota Terubuk, pada masa lampau Bengkalis terkenal akan hasil ikan Terubuknya yang berlimpah. Mayoritas penduduk Bengkalis adalah Suku Melayu. Bengkalis juga mempunyai beberapa suku terasing yaitu Suku Sakai, Akit, dan Suku Asli. Suku Sakai tersebar di Kecamatan Mandau, Suku Akit tersebar di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, sedangkan Suku Asli tersebar di Sekitar Pulau Bengkalis pada Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Di Kecamatan Bantan Komunitas Suku Asli menetap di beberapa desa dari 23 desa yang ada di Kecamatan Bantan. Dahulu masyarakat melayu menyebutnya Suku Asli sebagai Suku Orang Hutan, di sebabkan suku tersebut bertempat tinggal di hutan sekarang suku orang hutan berganti nama menjadi suku Asli.<sup>4</sup>

Mata pencaharian Suku Asli mencakup kegiatan-kegiatan: mencari dan mengumpulkan bakau, membuat atap rumbio, jaring udang, dan memburu hewan

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bengkalis](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkalis) diunduh pada 11 maret 2018

di hutan. Hampir semua Suku Asli mengandalkan hidupnya dari sumber yang tersedia di alam, ataupun menjadi buruh kasar dengan bayaran rendah, semua itu mereka jalani karena, memang tidak ada pilihan mengingat bahwa rata-rata pendidikannya yang rendah, pada akhirnya membuat Suku Asli menjadi terbelakang. Apalagi ekosistem alam yang semakin rusak, akibat eksploitasi hasil alam yang berlebihan. Kekayaan alam yang dulu bisa menghidupi Suku Asli kini sudah banyak yang rusak.

KAT ini tersebar diseluruh Indonesia, baik di pegunungan, tepi pantai, perbatasan, dan wilayah yang sulit untuk di akses. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, persebaran KAT di Indonesia sebesar 229.479 kepala keluarga (KK) dan pada tahun 2013, sementara Dinas Sosial Provinsi Riau 2015 merilis populasi KAT untuk di Provinsi Riau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 1. 1

## Populasi KAT di Provinsi Riau 2015

No	Kab/ Kota	Nama Suku	Populasi	
			KK	JIWA
1	Bengkalis	Asli	1,525	6,674
		Akit	1,505	9,568
		Sakai	2,094	9,953
2	INHU	Talang	3,441	16,334
		Mamak		
3	INHIL	Laut/Duano	1,010	4,196
4	ROHUL	Bonai	1,916	9,569
5	PELELAWAN	Akit	324	1,533
6	SIAK	Akit	125	500
7	ROHIL	Bonai	200	684
8	MERANTI	Akit	1,419	5,719
Jumlah			13,559	64,730

Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi Riau 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebar di delapan Kabupaten/Kota dengan populasi 13,559 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah jiwa 64, 730 jiwa. KAT yang ada

di Kabupaten Bengkalis tersebar di delapan Kecamatan dengan populasi 5123 KK yang terdiri dari Suku asli, Suku Akit dan Suku Sakai, sebagaimana pada tabel berikut ini;

Tabel 1. 2

Populasi KAT di Kabupaten Bengkalis 2015

No	Kecamatan	Suku			Jumlah
		Asli	Akit	Sakai	
1	Bengkalis	673	-	-	673
2	Bantan	852	-	-	852
3	Bukit Batu	-	-	-	-
4	Siak Kecil	-	-	-	-
5	Rupat	-	812	-	812
6	Rupat Utara	-	692	-	692
7	Mandau	-	-	1239	1239
8	Pinggir	-	-	855	855
<b>Jumlah</b>		<b>1525</b>	<b>1504</b>	<b>2094</b>	<b>5123</b>

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2015

Data di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkalis Suku Asli yang berdomisili di sebagian kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga suku,

Suku Sakai dengan populasi 2094 KK, Suku Asli dengan populasi 1525 KK, Suku Akit dengan populasi 1504 KK.,<sup>5</sup>

Berdasarkan konvensi International Labour Organization (ILO 1989) masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan payung hukum dan atau pengaturan khusus.

Di dalam Kepres RI No. 111 Tahun 1999 pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

Persoalan kesenjangan dimaksud salah satunya dialami oleh KAT atau yang sebelumnya dikenal sebagai Suku Terasing dan Masyarakat Terasing.

Persoalan yang dirasakan oleh KAT terkait dan serupa dengan kriteria atau karakteristik KAT, bersifat kompleks dan multidimensional sehingga perlu adanya usaha pemberdayaan secara mendalam, terintegrasi, holistik, dan berkesinambungan baik dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan komponen masyarakat sipil.

---

<sup>5</sup> <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/15885/15419> di unduh 10 april 2018



Kesuksesan pemberdayaan KAT selain dipengaruhi oleh tingkat keikutsertaan KAT dan komunitas masyarakat sekitarnya, serta kaitannya erat dengan partisipasi semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas/instansi sektoral di provinsi maupun kabupaten, dunia usaha, lembaga keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya, sesuai dengan keperluan KAT, yang dilakukan secara sungguh-sungguh serta di implementasikan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan.

KAT merupakan bagian dari warganegara Indonesia yang merupakan golongan paling lemah dalam struktur dan perkembangan masyarakat. KAT dihadapkan berbagai problema ketertinggalan dalam dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, keadaan ini timbul sebagai akibat dari kondisi keberadaan mereka yang sulit diakses dan secara sosial termasuk dalam budaya yang terasing, sehingga hubungan sosial dengan komunitas masyarakat luar yang sudah lebih modern tidak terjalin dengan baik.

Penyelenggaraan pendidikan pada KAT tidak bisa dipersamakan dengan pendidikan di sekolah pada umumnya sebab persoalan sosial yang dihadapkan sifatnya sangat kompleks meliputi segi kehidupan.

Pemerintah selaku penyelenggara harus menjadi aktor utama sebagai wujud pelaksana amanah UUD 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Belum terselesaikannya permasalahan kesejahteraan sosial mengakibatkan masih ada KAT yang menjalani kehidupan dengan kondisi sangat

memprihatinkan. KAT menempati lingkungan yang secara geografis relatif sulit diakses.

KAT kebanyakan hidup dalam keterpencilan, keadaan ini membuat KAT sangat minim dalam mengakses pelayanan sosial dasar, politik dan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik menjadi sesuatu hal yang sangat langka untuk dirasakan oleh kelompok masyarakat ini. KAT sebagai bagian dari warga negara Indonesia belum mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan dan terus mengalami ketertinggalan.



*Gambar 1.1* Kampung KAT di Desa Berancah Kec. Bantan

KAT ialah kumpulan sosial budaya yang berkarakter lokal dan tersebar dan kurang atau belum berpartisipasi dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun politik (Keppres No. 111 Tahun 1999).

Pengertian ini mengandung arti bahwa komunitas dipahami sebagai komunitas yang memiliki budaya atau adat tertentu yang berbeda atau unik. Sehingga sering

disamakan dengan komunitas lokal asli yang memiliki berbagai kelebihan yang harus dipertahankan seperti kerjasamanya, budayanya, keguyubannya, dan interaksi sosialnya. komunitas kurang terlibat dalam jaringan pelayanan sosial, ekonomi, maupun politik. Adapun ciri-ciri komunitas adat terpencil adalah sebagai berikut :

1. “Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogeny KAT umumnya hidup dalam kelompok kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan pihak luar. Disamping itu kelompok KAT hidup dalam satu kesatuan suku yang sama dan bersifat tertutup.
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan Pranata sosial yang ada dan perkembangan dalam KAT pada umumnya bertumpu pada hubungan kekerabatan dimana kegiatan mereka sehari-hari masih didasarkan pada hubungan kekerabatan dimana kegiatan mereka sehari-hari masih didasarkan pada hubungan darah dan ikatan tali perkawinan. Pranata sosial yang adat tersebut meliputi antara lain pranata ekonomi, pranata kesehatan, pranata hukum, pranata agama, pranata kepercayaan, pranata politik, pranata pendidikan, pranata ilmu pengetahuan, pranata ruang waktu, pranata hubungan sosial, pranata kekerabatan, pranata sistem organisasi sosial.
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau Secara geografis KAT umumnya berada didaerah pedalaman, hutan, pegunungan, perbukitan, laut, rawa, daerah pantai yang sulit dijangkau. Kesulitan ini diperkuat oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, baik ke atau

dari kantong KAT. Kondisi ini mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan pihak luar dalam memberikan pelayanan pembangunan secara efektif dan terpadu.

4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem Aktivitas kegiatan ekonomi warga KAT sehari-hari hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (kebutuhan sehari-hari). Peralatan teknologinya sederhana Dalam upaya memanfaatkan dan mengolah SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dalam kegiatan pertanian, berburu, maupun kegiatann lainnya, KAT masih menggunakan peralatan yang sederhana yang diwariskan secara turun-temurun.
5. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi Kehidupan KAT sangat menggantungkan kehidupan kesehariannya baik itu fisik, mental dan spiritual pada lingkungan alam seperti umumnya aktivitas keseharian warga berorientasi pada kondisi alam seperti umumnya aktivitas keseharian warga berorientasi pada kondisi alam atau berbagai kejadian dan gejala alam.
6. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana konsekuensi logis dari keterpencilan, akses berbagai pelayanan sosial ekonomi dan politik yang tersedia dilokasi atau di sekitar lokasi tidak ada atau sangat terbatas sehingga menyebabkan sulitnya warga KAT untuk memperolehnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> [http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/pluginfile.php/31257/mod\\_resource/content/4/24.1.pdf](http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/pluginfile.php/31257/mod_resource/content/4/24.1.pdf) di unduh pada 17 september 2018

Pada saat ini, sangat penting bagi setiap masyarakat Indonesia bersama kementerian, pemerintah dan dinas/instansi terkait untuk saling berkolaborasi memusatkan perhatian mereka dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi khususnya pada masyarakat KAT yang mana mereka dihadapkan dengan beragam permasalahan yang terjadi, diantaranya yakni minimnya peran dari pemerintah secara konkret dalam melaksanakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat KAT, lingkungan tempat tinggal mereka yang sulit untuk diakses dan terisolasi dari dunia luar membuat mereka tidak mendapatkan akses-akses yang seharusnya mereka rasakan sebagai fasilitas negara terutama akses akan sumber daya terlebih pendidikan. Tidak hanya itu, kebanyakan masyarakat KAT berpandangan sempit pendidikan itu bukanlah sesuatu hal yang penting. Hal ini menyebabkan mereka mengalami krisis motivasi dan keinginan akan kebutuhan pendidikan yang berujung pada rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan.<sup>7</sup>

Diperlukan tindakan nyata dalam meningkatkan pengetahuan pada masyarakat KAT mengenai pentingnya pendidikan dalam mempersiapkan generasi yang bermutu untuk kepentingan masa depan KAT dan terkait dengan keberadaan serta kelangsungan hidup dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan yang berlanjut baik untuk KAT utamanya maupun bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka dalam mengembangkan kreativitas serta inovasi.

<sup>7</sup> <http://macheda.blog.uns.ac.id/2009/06/24/pendidikan-dalam-mengentaskan-kemiskinan-masyarakat-pedesaan/> Diunduh pada 17 september 2018

Sebagai upaya pemberantasan kemiskinan yang terjadi, terlebih-lebih yang dirasakan oleh masyarakat KAT selama ini menyebabkan suatu pukulan dahsyat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah untuk melaksanakan berbagai usaha-usaha dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan menambahkan pemahaman mereka akan kepentingan pendidikan. Pemerintah tampaknya mulai sadar bahwa salah satu yang menjadi hambatannya ialah ketimpangan dan ketidakadilan. Usaha-usaha penanggulangan dalam pengetasan kemiskinan pada KAT ini dapat terselesaikan melalui upaya pendidikan dan pelatihan, yakni dengan mendidik dan memperdayakan KAT baik tidak maupun yang bercukupan.

Peran bidang pendidikan adalah salah satu usaha pembangunan dalam pemberantasan kebodohan dan diharapkan pendidikan menjadi salah satu solusi pemberantasan kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi masyarakat lebih khususnya KAT yang taraf kesejahteraan sosialnya masih banyak yang rendah. Untuk mencapainya, usaha lain yang dapat diperbuat dalam mendorong tercapainya pemberantas kemiskinan melalui peran serta lembaga keagamaan, lembaga sosial, serta masyarakat untuk bersama sama dan saling berkontribusi dalam melakukan pemberdayaan secara terstruktur, berkesinambungan dengan tujuan yang jelas.

Realitasnya masih sering kita temukan masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat KAT belum mengenyam pendidikan. Padahal, secara bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memiliki ketertarikan mengenai peran pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Komunitas Adat Terpencil khususnya pada Suku Asli, karena Suku Asli adalah masyarakat yang terbelakang sehingga dibutuhkan penanganan khusus bagi Suku Asli. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mengenai penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan Bantan dengan mengambil judul penelitian :

**“ANALISIS PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PENYEDIAAN AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN PADA SUKU ASLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana solusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya Peran Pemerintah Kabupaten

Bengkalis dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari peneliti di dalam proposal, sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis?

2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan pada masyarakat Suku Asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?

3. Untuk menganalisa implemetas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya mensejahterahkan Suku Asli melalui bidang pendidikan di Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis?

#### b. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis :

a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang pendidikan.

b. Memberikan tambahan bahan dan sebagai masukan serta referensi bagi penelliti yang di lakukan selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis





a. Bagi masyarakat

Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang peran pemerintah dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada KAT.

b. Bagi akademisi

Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi untuk mengetahui lebih lanjut peran pemerintah dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada KAT.

c. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi pemerintah.